

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- F. Isjwara, 1992, *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung : Bina Cipta.
- Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodeologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.
- Joeniarto, 1992, *Perkembangan Pemerintah Lokal*. Jakarta :Bumi Aksara
- Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Koentjoroningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat (edisi ketiga)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nazir, 1998, *Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia Indonesia.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Roni Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*.
- R. Wiyono, 2010, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sirajuddin,dkk, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Sentara Press.
- Siswanto Sunarso, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2014, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*. UI Pers.
- , 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Supandi, 2016, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT. Alumni.

Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, 2001, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Kencana Perdana Media.

Totok Soeprijanto, *Sumber – Sumber Kewenangan*, Widyaiswara Pusdiklat PSDM.

Yuslim, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Padang: Sinar Grafika.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Permen PAN-RB Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

## **C. WEBSITE**

<https://www.bkn.go.id>